LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juni 2025

JUDUL

"Langkah-langkah strategis di 4 bidang utama: keuangan, SDM, pelayanan, dan tata kelola. Untuk mengatasi permasalahan BLUD RSUD Kabupaten Klungkung."

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Kesehatan

Tim Ahli

Gemaya Wangsa, S.H.

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Secara keseluruhan, BLUD (PPK-BLUD) di Kabupaten Klungkung—terutama di RSUD Klungkung—menunjukkan perkembangan positif pada aspek pelayanan dan tata kelola, namun belum sepenuhnya menghasilkan dampak signifikan pada efisiensi dan kinerja keuangannya dilihat dari Studi Universitas Udayana (2017) menemukan tidak ada perubahan signifikan dalam performa keuangan—ruang rawat bed occupancy ratio (BOR), lama rawat (ALOS), dan indikator operasional lainnya relatif stabil sebelum dan sesudah perubahan BLUD. Permasalahan seperti klaim BPJS tertunda, beban false-emergency, dan belum optimalnya tarif layanan terus menekan pendapatan dan efisiensi keuangan kami harapkan dapat ditingkat pada kepemimpinan bapak bupati dan wakil bupati yakni 2025-2030

I. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan utama memaksimalkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Klungkung—terutama pada sektor kesehatan seperti RSUD Klungkung—adalah untuk menciptakan layanan publik yang efisien, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

II. Ide dan Gagasan

Berikut adalah berbagai permasalahan utama BLUD RSUD Kabupaten Klungkung yang telah teridentifikasi berdasarkan laporan media, dokumen publik, dan kajian akademik:

1. Masalah Klaim BPJS dan Pembiayaan Layanan * Banyak klaim BPJS ditolak karena

pasien IGD tidak dalam kondisi darurat (false emergency). * RSUD menanggung beban pembiayaan, menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. * Klaim tertunda dari BPJS mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Yang akan berdampak pada tekanan kas rumah sakit, menurunnya kemampuan pembelian obat dan alat medis serta terganggunya kesejahterahan tenaga medis

2. Perekrutan Pegawai BLUD Tanpa Transparansi: * Pegawai kontrak langsung diangkat menjadi pegawai BLUD Profesional tanpa seleksi formal (tes tulis, wawancara, kesehatan). * Diduga melibatkan anak pejabat RS, menimbulkan tudingan nepotisme dan pelanggaran etika publik. Yang akan berdampak pada Ketidakadilan dan kecemburuan di kalangan pegawai lain, Menurunnya kredibilitas manajemen SDM RSUD serta Potensi konflik sosial di lingkungan kerja.

3. Kinerja Keuangan dan Efisiensi BLUD yang Belum Optimal * Setelah berstatus BLUD, tidak ada peningkatan signifikan dalam efisiensi keuangan atau kinerja layanan. * Pendapatan alternatif belum digarap maksimal (misal: lahan parkir, penitipan jenazah, layanan tambahan). Dampaknya yaitu BLUD gagal menjadi model pelayanan publik yang efisien, Ketergantungan pada dana APBD masih tinggi serta Kurangnya inovasi pelayanan yang menghasilkan.

4. Kasus Pungutan Liar (Pungli) * Tahun 2021, terjadi kasus dokter bedah meminta pungutan di luar prosedur untuk tindakan operasi. * Sistem pengawasan internal dinilai lemah. Yg menyebabkan Masyarakat kehilangan kepercayaan pada integritas layanan RSUD. dan Membuka peluang penyimpangan lain.

5. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas Publik * Laporan kinerja keuangan, SDM, dan pelayanan tidak secara rutin dipublikasikan atau diakses masyarakat. * Tidak ada dashboard kinerja atau laporan terbuka yang bisa diakses oleh publik. Yang berdampak pada Sulitnya pengawasan eksternal, Keputusan manajerial tidak bisa dikritisi oleh publik serta Rawan penyalahgunaan wewenang.

III. Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan BLUD RSUD Kabupaten Klungkung secara komprehensif, diperlukan langkah-langkah strategis di 4 bidang utama: keuangan, SDM, pelayanan, dan tata kelola. Berikut rekomendasi solusinya berdasarkan permasalahan yang ada: 1. Mengatasi Klaim BPJS Tertunda dan False Emergency Permasalahan: * Klaim BPJS ditolak karena banyak pasien datang tanpa kondisi darurat. * Kerugian rumah sakit mencapai Rp 1 miliar. Solusi: * Edukasi publik tentang sistem rujukan dan kriteria IGD darurat, bekerja sama dengan Puskesmas dan media lokal. * Implementasi triase IGD ketat oleh dokter jaga (dengan pelatihan tambahan), sehingga klaim tidak mudah ditolak. * Negosiasi dengan BPJS untuk penyederhanaan klaim atau skema pembayaran sebagian (partial reimbursement) atas kasus yang secara medis memang layak. 2. Mencegah Penyalahgunaan Proses Pengangkatan Pegawai Permasalahan: * Pegawai kontrak langsung diangkat sebagai BLUD Profesional tanpa seleksi resmi. * Ada dugaan nepotisme dan konflik kepentingan. Solusi: * Terapkan mekanisme rekrutmen terbuka dan transparan, berbasis merit: uji tulis, wawancara, dan uji kesehatan. * Bentuk tim independen pengawas rekrutmen dari unsur eksternal (misal: inspektorat, tokoh masyarakat, LSM). * Revisi SOP kepegawaian BLUD agar mencantumkan prosedur eksplisit terkait mutasi, pengangkatan, dan evaluasi kinerja

pegawai. * Terapkan Whistleblowing System internal agar pelanggaran bisa dilaporkan anonim. 3. Optimalisasi Keuangan dan Kinerja BLUD Permasalahan: * Kinerja keuangan belum membaik walau sudah menjadi BLUD. * Pendapatan alternatif belum dimaksimalkan. Solusi: * Terapkan Unit Costing System (biaya per layanan), agar tarif dan anggaran berbasis data. * Kembangkan layanan penunjang berbayar seperti: * One-day care untuk tindakan ringan * Layanan penitipan jenazah profesional * Digitalisasi dan monetisasi sistem antrian/registrasi cepat * Tunjuk manajer BLUD khusus dengan latar belakang manajemen keuangan/RS profesional. 4. Perbaikan Tata Kelola & Etika Layanan Permasalahan: * Isu pungli masih melekat pada citra RS. * Kurangnya transparansi terhadap publik. Solusi: * Terapkan sistem transparansi biaya dan layanan, misalnya: papan digital biaya di lobi, QR code layanan publik. * Adakan pelatihan etika pelayanan berkala untuk dokter dan perawat. * Kembangkan sistem feedback real-time (kotak saran digital, survei kepuasan pasien), sebagai indikator kinerja. 5. Monitoring & Evaluasi Rekomendasi sistem pengawasan: * Bentuk Komite Pengawas BLUD RSUD Klungkung, melibatkan Pemda, DPRD, dan masyarakat. * Gunakan dashboard kinerja berbasis digital yang menampilkan capaian keuangan, SDM, klaim, dan pengaduan publik. * Lakukan audit keuangan dan audit kinerja tahunan oleh tim independen (misalnya BPKP atau pihak universitas).

Semarapura, 08 Juni 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-